

Efektivitas Revitalisasi Alun-alun Garut Tahun 2022 dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan

Meli Amelia^{a*}, Erna Rustiana^b, Zulkifli Adnan^c, Lia Juliasih^d

^{a,b,c,d}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut, Indonesia

e-mail: ^{a*}24012122037@uniga.ac.id, ^bernarustiana@uniga.ac.id, ^cZulkifli.adnan@uniga.ac.id, ^dLia.Juliasih@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas revitalisasi Alun-alun Garut tahun 2022 sebagai bagian dari implementasi kota berkelanjutan sesuai targetan SDGs 11.7, yaitu ruang publik yang inklusif, aman, dan mudah diakses. Konsep kota berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pembangunan fisik, keterlibatan sosial, dan perlindungan lingkungan. Rumusan masalah berfokus pada sejauh mana revitalisasi mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mencapai lima dimensi efektivitas kebijakan publik yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat waktu. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dengan memanfaatkan data primer dari wawancara dengan Bappeda dan Disperkim Kabupaten Garut serta data sekunder dari dokumen, literatur, dan media. Hasil menunjukkan revitalisasi berhasil meningkatkan interaksi sosial, menyediakan fasilitas inklusif, dan mendorong ekonomi informal. Namun, menghadapi kendala terkait zonasi pedagang, kesadaran kebersihan, dan koordinasi antarinstansi. Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) tahun 2025 diharapkan memperkuat tata kelola dan keberlanjutan ruang publik. Temuan menegaskan efektivitas revitalisasi bergantung pada pembangunan fisik, perilaku sosial, manajemen tata kelola, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Revitalisasi; Kota Berkelanjutan; SDGs; Tata Kelola Perkotaan; Partisipasi Masyarakat.

The Effectiveness of the 2022 Revitalization of Garut Square from a Sustainable City Perspective

Abstract

This study evaluates the effectiveness of the 2022 revitalization of Garut Square as part of the implementation of a sustainable city in line with SDGs 11.7, which emphasizes inclusive, safe, and easily accessible public spaces. The sustainable city concept stresses a balance between physical development, social engagement, and environmental protection. The research problem focuses on the extent to which the revitalization can integrate social, economic, and environmental dimensions and achieve the five dimensions of public policy effectiveness, namely correct policy, proper implementation, accurate targeting, suitable environment, and timeliness. A qualitative approach using a case study method was employed, utilizing primary data from interviews with Bappeda and Disperkim of Garut Regency and secondary data from documents, literature, and media. Results show that the revitalization successfully enhanced social interaction, provided inclusive facilities, and promoted informal economic activities. However, challenges remain regarding vendor zoning, hygiene awareness, and inter-agency coordination. The preparation of the 2025 Detail Engineering Design (DED) is expected to strengthen governance and the sustainability of public space. Findings indicate that revitalization effectiveness depends on physical development, social behavior, governance management, and community participation.

Keywords: Revitalization Effectiveness, Sustainable City, SDGs, Urban Governance, Community Participation.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kota berkelanjutan menjadi isu strategis dalam perencanaan perkotaan modern karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan (Bahri & Kurniati, 2025). Konsep ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin adanya keadilan sosial serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara nyaman dan aman (Trifita & Amaliyah, 2020).

Secara khusus, Target 11.7 SDGs mengatur aksesibilitas bagi kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas (SDGs Center UB, 2025). Implementasi target tersebut menuntut integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga ruang publik berfungsi optimal sebagai sarana interaksi, rekreasi, dan produktivitas. Secara teoritis, kota berkelanjutan menegaskan mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang. Prinsip tersebut menuntut perencanaan jangka panjang yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap kebijakan pembangunan (Sinaga et al., 2025).

Dalam pembangunan kota berkelanjutan, dimensi sosial menitikberatkan pada pemerataan akses terhadap fasilitas umum, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan ikatan sosial (Nurparikha et al., 2023; Afandi et al., 2024; Taryono et al., 2025;). Pada aspek ekonomi, perhatian diarahkan pada penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pemanfaatan sumber daya

secara efisien (Agustina dan Pradesa, 2024). Sementara itu, dimensi lingkungan menekankan upaya menjaga ekosistem, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengelola limbah secara berkelanjutan (Nugraha et al., 2025; Taryono et al., 2025). Integrasi ketiga dimensi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi pembangunan kota berkelanjutan dalam praktik perencanaan perkotaan (Bellastuti & Fathurrahman, 2023).

Di Indonesia, alun-alun merupakan ruang publik tradisional yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Anwar et al., 2022; Mursalin dan Anwar, 2024). Revitalisasi alun-alun dapat memperkuat fungsi tersebut sekaligus meningkatkan nilai ekologis kota (Nadiantika et al., 2022). Menurut Gehl dalam *Gelb People* (2024) menegaskan bahwa ruang publik ideal harus mendukung aktivitas dasar, pilihan, dan interaksi sosial secara seimbang. Artinya, revitalisasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, melainkan juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang melekat di masyarakat (Sari & Yuliani, 2024).

Untuk mengukur keberhasilan implementasi revitalisasi dalam konteks kota berkelanjutan, diperlukan kerangka evaluasi efektivitas yang komprehensif. Riant Nugroho pada tahun 2012 mengembangkan teori efektivitas kebijakan publik yang terdiri dari lima dimensi tepat yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat waktu (Riswanda et al., 2024). Kerangka teoritis efektivitas ini memberikan parameter sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi revitalisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Revitalisasi Alun-alun Garut pada tahun 2022 menjadi contoh penerapan kota berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp12,7 miliar untuk

pembangunan fasilitas baru, seperti *amphitheater*, tribun selasar, taman bermain, perpustakaan mini, serta perbaikan sarana lainnya (Arifin, 2022). Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023 yaitu Ridwan Kamil, dengan harapan Alun-alun Garut menjadi ruang produktif, sarana kreativitas warga, dan pendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 (Pamungkas, 2022).

Meski telah direvitalisasi, pemanfaatan Alun-alun Garut belum sepenuhnya optimal. Beberapa fasilitas disalahgunakan dan pengelolaan ruang publik masih menghadapi hambatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan revitalisasi dengan praktik di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah merencanakan revitalisasi ulang pada 2025 melalui penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai upaya perbaikan jangka panjang (Disperkim Kabupaten Garut, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana efektivitas revitalisasi Alun-alun Garut tahun 2022 dalam perspektif kota berkelanjutan. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan implementasi dengan menggunakan lima dimensi tepat dari teori Riant Nugroho, serta menilai integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam praktik revitalisasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas revitalisasi dengan menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan serta kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesenjangan antara tujuan kebijakan yang direncanakan dengan realitas pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian revitalisasi Alun-alun Garut dan

merumuskan rekomendasi strategis agar pengelolaan ruang publik di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan sesuai dengan prinsip kota berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis efektivitas revitalisasi Alun-alun Garut tahun 2022 dalam perspektif kota berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut sebagai instansi yang berperan langsung dalam perencanaan serta implementasi revitalisasi. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen perencanaan, serta pemberitaan media yang relevan dengan revitalisasi Alun-alun Garut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Bappeda dan Disperkim Kabupaten Garut untuk memperoleh informasi langsung mengenai kebijakan, pelaksanaan, dan hambatan revitalisasi. Selain itu, telaah dokumen perencanaan, kajian literatur, dan analisis pemberitaan digunakan untuk memperkuat data serta memberikan gambaran komprehensif mengenai revitalisasi Alun-alun Garut.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori efektivitas kebijakan publik yang mencakup lima dimensi tepat, yaitu kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan waktu. Analisis ini dipadukan dengan prinsip kota berkelanjutan yang menekankan keseimbangan aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan. Melalui kerangka tersebut, penelitian berupaya menilai sejauh mana revitalisasi Alun-alun Garut telah mencapai tujuan yang direncanakan serta mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

C. PEMBAHASAN

Revitalisasi Alun-alun Garut tahun 2022 merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) targetan 11.7, yang menekankan penyediaan ruang publik yang inklusif, aman, mudah diakses, dan berkelanjutan. Efektivitas program ini dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat waktu. Berikut merupakan penjelasan dari kelima dimensi tersebut.

1. Tepat Kebijakan

Arah kebijakan revitalisasi cukup selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran area pedestrian, *amphitheater*, ruang hijau, hingga jalur ramah disabilitas menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk menghadirkan ruang publik yang inklusif dan representatif. Kegiatan masyarakat, seperti festival kuliner dan pementasan seni, membuktikan bahwa ruang publik ini berhasil menjadi wadah ekspresi sosial budaya di Kabupaten Garut. Namun, kelemahan muncul pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, di mana sebagian fasilitas berubah fungsi, misalnya selasar yang seharusnya untuk pameran seni malah digunakan pedagang kaki lima.

2. Tepat Pelaksanaan

Secara fisik, pelaksanaan revitalisasi dapat dikatakan berhasil. Infrastruktur publik terbangun dengan baik dan sempat memberi dampak positif, seperti meningkatnya kunjungan. Akan tetapi,

lemahnya pengawasan pascarevitalisasi menimbulkan permasalahan baru. *Amphitheater* lebih sering digunakan untuk aktivitas tak terorganisir, sementara tribun atas yang dirancang sebagai ruang hijau justru dibiarkan kosong bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik berhasil, tetapi tata kelola operasional masih lemah.

3. Tepat Target

Revitalisasi telah membuka ruang bagi interaksi sosial, peluang ekonomi informal, serta sarana rekreasi. Ramainya pengunjung memberi dampak positif pada pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, sehingga sirkulasi ekonomi meningkat. Di sisi lain, penyimpangan fungsi ruang dan ketidakaturan zonasi pedagang justru menimbulkan kesan kumuh, mengurangi kenyamanan, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi sosial dengan ekonomi. Dengan demikian, meskipun target partisipasi masyarakat tercapai, aspek keberlanjutan sosial dan budaya belum sepenuhnya terpenuhi.

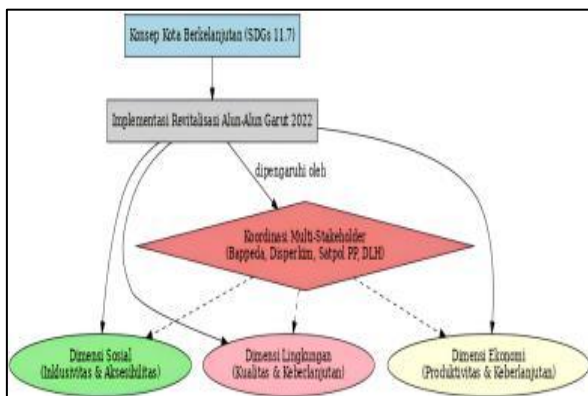
4. Tepat Lingkungan

Dari sisi desain, revitalisasi telah menyediakan taman, ruang penghijauan, dan fasilitas kebersihan. Namun, rendahnya kesadaran pengunjung membuat sampah tetap menumpuk, terutama di tribun dan taman. Area hijau yang seharusnya mendukung kualitas lingkungan justru tidak terawat dan beralih fungsi. Hal ini menandakan bahwa dimensi lingkungan sebenarnya sudah diakomodasi dalam perencanaan, tetapi pengelolaan pascaimplementasi dan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama.

5. Tepat Waktu

Dalam jangka pendek, manfaat revitalisasi terlihat jelas yaitu meningkatnya kunjungan, aktivitas komunitas, serta peluang ekonomi. Namun, dalam jangka menengah, kelemahan mulai muncul seperti kerusakan fasilitas, penyalahgunaan fungsi ruang, dan lemahnya pengelolaan baik oleh instansi yang bersangkutan juga oleh masyarakat.

Revitalisasi Alun-alun Garut pada dasarnya telah mencapai tujuan sosial-ekonomi jangka pendek, namun masih menghadapi kendala pada aspek lingkungan, pemeliharaan fasilitas, dan keberlanjutan pengelolaan. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh tata kelola yang partisipatif antarinstansi serta penguatan kesadaran kolektif masyarakat. Keterkaitan antara aktor dan dimensi pembangunan dapat dipetakan melalui kerangka sebagaimana terlihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Model Revitalisasi Alun-alun Garut dalam Kerangka Kota Berkelanjutan
Sumber : Hasil Olah Penulis, (2025).

Gambar 1. Tersebut menunjukkan model revitalisasi Alun-alun Garut dalam kerangka kota berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi Alun-alun Garut dipengaruhi oleh koordinasi *multi-stakeholder* yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim),

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Koordinasi ini menghubungkan tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan tata kelola pemerintahan daerah sebagai penggerak utama.

1. Aspek Sosial

a. Aktivitas Positif Masyarakat

Revitalisasi berhasil menghadirkan ruang publik yang mampu mendorong interaksi sosial baru. Area pedestrian menjadi arena bagi komunitas olahraga, seperti kelompok lari dan pesepeda, untuk melakukan aktivitas rutin. *Amphitheater* dimanfaatkan komunitas seni untuk menampilkan karya kreatif, mulai dari pertunjukan musik akustik hingga pementasan drama.

Selain itu, muncul beragam kegiatan massal yang memperkuat identitas kolektif warga. Contohnya diadakan festival baso aci yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha kuliner lokal sekaligus menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga memperluas fungsi ruang publik sebagai pusat ekspresi sosial dan budaya.

b. Penyimpangan Fungsi Ruang Publik

Di balik aktivitas positif tersebut, terdapat pula penyalahgunaan fungsi ruang. Selasar yang seharusnya difungsikan untuk pameran seni rupa lukisan berubah menjadi tempat berdagang bagi pedagang kaki lima serta lokasi berkumpul anak jalanan. *Amphitheater* yang didesain untuk kegiatan seni lebih sering digunakan

untuk aktivitas tidak terorganisir sehingga mengurangi nilai estetika dan tujuan awalnya.



Gambar 2. Selasar Alun-alun Garut
Sumber : Hasil Olah Penulis, (2025).

Tribun bagian atas yang dirancang sebagai ruang hijau justru dibiarkan kosong. Beberapa pengunjung bahkan memanfaatkannya sebagai tempat penimbunan sampah, menandakan lemahnya kesadaran sosial dalam menjaga keberlanjutan fasilitas publik. Dengan demikian, revitalisasi yang dimaksudkan untuk memperkuat kohesi sosial masih menghadapi hambatan akibat perilaku masyarakat yang belum sejalan dengan tujuan perencanaan.

2. Aspek Ekonomi

- a. Peluang Ekonomi Informal
Pasca revitalisasi, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat secara signifikan. Raminya pengunjung, terutama pada akhir pekan dan ketika terdapat acara massal, membuka peluang besar bagi pedagang kaki lima hingga pelaku usaha mikro. Berbagai produk seperti makanan ringan, minuman, dan pernak-pernik khas Garut diajakan di sekitar alun-alun. Hal ini memperlihatkan bahwa revitalisasi berkontribusi pada penguatan

ekonomi rakyat melalui peningkatan sirkulasi perdagangan informal.

b. Ketidakaturan Zonasi dan Dampaknya

Meski peluang ekonomi meningkat, ketiadaan pengaturan zonasi berdagang justru menciptakan persoalan baru. Pedagang kaki lima beroperasi di area pedestrian, selasar, bahkan dekat jalur masuk utama, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Ketidakteraturan ini menimbulkan kesan kumuh yang berlawanan dengan semangat revitalisasi.

Selain itu, keberadaan pedagang yang tidak terkendali juga menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi ruang publik sebagai sarana rekreasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani melalui kebijakan zonasi dan regulasi yang jelas, maka potensi ekonomi dapat berbalik menjadi sumber masalah tata ruang.

3. Aspek Lingkungan

a. Upaya Penyediaan Ruang Hijau dan Fasilitas

Secara desain, revitalisasi Alun-alun Garut telah menyediakan taman, area penghijauan, dan fasilitas kebersihan yang memadai. Tempat sampah tersedia di beberapa titik strategis, sedangkan area hijau dirancang untuk meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan suasana asri di pusat kota. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian pada prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Walaupun sarana kebersihan tersedia, kondisi di lapangan memperlihatkan

perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Banyak pengunjung membuang sampah sembarangan, terutama di area tribun dan taman. Kurangnya pengawasan dan pengelolaan rutin membuat sampah menumpuk dan estetika ruang publik menurun.

Selain itu, area yang semestinya menjadi ruang hijau di tribun atas dibiarkan kosong. Bukan hanya tidak termanfaatkan, tetapi juga berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah oleh sebagian oknum. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan pada perencanaan fisik, melainkan pada pengelolaan dan pembentukan perilaku kolektif masyarakat dalam menjaga ruang publik.

4. Aspek Tata Kelola dan Inklusivitas

a. Penyediaan Fasilitas Inklusif

Revitalisasi Alun-alun Garut 2022 berupaya menghadirkan ruang yang inklusif dengan penyediaan jalur ramah kursi roda bagi penyandang disabilitas, area bermain anak, serta fasilitas bagi lanjut usia dan perempuan. Kehadiran fasilitas ini memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan akses bagi seluruh kelompok masyarakat.

b. Kendala Tata Kelola

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk kebutuhan masyarakat, namun dapat terlihat sebagian fasilitas tidak dimanfaatkan sesuai fungsi atau bahkan mulai mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Lemahnya koordinasi antarinstansi

dalam pengelolaan pascarevitalisasi ini juga dapat dilihat dari minimnya pengawasan terhadap aktivitas para pedagang juga dari segi kebersihannya. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola ruang publik tidak cukup hanya dengan penyediaan infrastruktur saja, tetapi memerlukan sistem manajemen yang berkelanjutan juga.

c. Rencana Perbaikan melalui DED 2025

Kesadaran akan adanya kelemahan dalam revitalisasi 2022 ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kembali *Detail Engineering Design* (DED) revitalisasi pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa efektivitas revitalisasi sebelumnya masih rendah, sehingga diperlukan rencana baru yang lebih matang. DED 2025 disusun bukan semata untuk mempercantik ruang publik, melainkan juga sebagai upaya koreksi atas permasalahan yang muncul, seperti lemahnya pemanfaatan ruang, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya tata kelola.

Berdasarkan temuan lapangan, revitalisasi Alun-alun tahun 2022 ini menghasilkan manfaat nyata berupa meningkatnya interaksi sosial, bertambahnya peluang ekonomi, serta tersedianya ruang hijau dan fasilitas inklusif. Namun, sejumlah kendala masih menghambat keberhasilan program, antara lain penyalahgunaan fungsi ruang publik, ketidakaturan aktivitas ekonomi informal, rendahnya kesadaran lingkungan, serta lemahnya tata kelola.

Penyusunan DED 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap kelemahan tersebut dan berupaya memperbaiki melalui perencanaan baru. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi ruang

publik tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh perilaku sosial, efektivitas manajemen tata kelola, serta keberlanjutan pengelolaan yang partisipatif.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Revitalisasi Alun-alun Garut yang dilaksanakan pada tahun 2022 dinilai cukup efektif sebagai implementasi konsep kota berkelanjutan. Keberhasilan ini terbukti melalui pemenuhan kelima dimensi efektivitas kebijakan publik, meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Dampak positifnya terlihat jelas dari hadirnya fasilitas yang inklusif, meningkatnya interaksi sosial masyarakat, serta tumbuhnya peluang ekonomi informal di sekitar area. Capaian ini secara langsung mencerminkan keterpaduan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang sejalan dengan prinsip SDGs poin 11.7, yaitu penyediaan ruang publik yang hijau, inklusif, aman, dan dapat diakses oleh semua pihak.

Meskipun demikian, program revitalisasi masih menghadapi tantangan signifikan pada dimensi lingkungan dan pemeliharaan pasca-pelaksanaan. Tantangan tersebut mencakup penyalahgunaan sarana oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan pengawasan pascarevitalisasi, yang turut berkontribusi terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari tujuan semula. Penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) untuk tahun 2025 diharapkan menjadi langkah korektif strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memastikan keberlanjutan fungsi ruang publik

secara lebih optimal, inklusif, dan berkeadilan di masa mendatang.

Berdasarkan temuan dan analisis tantangan yang ada, terdapat beberapa rekomendasi praktis untuk meningkatkan keberlanjutan dan fungsi Alun-alun Garut. Pertama, terkait Peningkatan Tata Kelola, perlu dibentuk mekanisme pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif antarinstansi terkait guna memastikan pemanfaatan fasilitas sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kedua, mengenai Pengaturan Zonasi Kegiatan Ekonomi, penting untuk segera menetapkan area khusus dan terpisah bagi Pedagang Kaki Lima. Zonasi ini bertujuan agar aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung dan merusak estetika ruang publik. Ketiga, untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat, perlu dilakukan edukasi dan kampanye perilaku yang bertanggung jawab secara berkelanjutan, berfokus pada pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan memanfaatkan fasilitas publik secara optimal. Keempat, terkait Pemeliharaan Fasilitas, manajemen harus menyusun dan mengimplementasikan jadwal perawatan rutin yang jelas bagi seluruh sarana dan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan fungsi jangka panjang dari ruang publik tersebut. Kelima, dianjurkan Evaluasi Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan komunitas lokal secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi revitalisasi berikutnya. Hal ini krusial untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat dan secara langsung meningkatkan efektivitas program. Dengan implementasi terpadu dari saran-saran ini, revitalisasi Alun-alun Garut diharapkan dapat sepenuhnya mewujudkan dirinya sebagai ruang publik yang inklusif, fungsional, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperindah kota tetapi juga meningkatkan kualitas hidup sosial, ekonomi, dan lingkungan warganya.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). Applying Collaborative Governance As An Intervention In Stunting Reduction An Empirical Community Empowerment Model In Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>
- Agustina, I., Pradesa, H.A. (2024). Praktek Pelaporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis Atas Literatur Terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7 (1), 24 – 46. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947>
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamis Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 112 - 121. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Arifin, Z. (2022, January 20). Pemprov Jabar selesaikan revitalisasi alun-alun Garut senilai Rp12,7 miliar. *Antara Jabar*. <https://jabar.antaranews.com/berita/352189/pemprov-jabar-selesaikan-revitalisasi-alun-alun-garut-senilai-rp127-miliar>
- Bahri, S., & Kurniati, E. (2025). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan-Pedesaan: Studi Kasus Provinsi Lampung*. <https://lenteranusa.id/>
- Bellastuti, D. B., & Fathurrahman, R. (2023). Konsep Good Urban Governance Sebagai Kerangka Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19060>
- Disperkim Kabupaten Garut. (2025). *DED Penataan Area Serbaguna (Co-Working Space)*.
- Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033
- Nadiantika, M. G., Wahyono, H., & Wahyono, & (2022). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Persepsi Masyarakat Terhadap Revitalisasi Alun-Alun Kota Semarang Sebagai Ruang Terbuka Publik*. 11(2), 171-180. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk|171>
- Nielsen, I. B. (2024, September 16). *How is paying attention to social infrastructure the key to an inclusive city?* Gehl People. <https://www.gehlpeople.com/knowledg-e-hub/articles/social-infrastructure-as-the-key-to-an-inclusive-city>
- Nugraha, C.A.P., Ravenska, N., Rejeki, P.W.A., Kirana, C.A.D. (2025). Mengukur Nilai Sosial Program Urban Farming: Studi SROI Pada Buruan SAE di Arcamanik. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4 (3), 223-237.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Pamungkas, W. W. (2022, January 23). Resmikan Alun-alun Garut, Ridwan Kamil Minta Perbanyak Kegiatan Kreatif. *Kabar Jabar*. <https://bandung.bisnis.com/read/20220123/549/1492308/resmikan-alun-alun-garut-ridwan-kamil-minta-perbanyak-kegiatan-kreatif>
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>
- Risna, T.A., Kurniawan, I., Rezeki, P.W.A., Ravenska. (2024). Perancangan Social Business Model Canvas BUMDes Mawa

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

- Raharja Di Desa Cibiru Wetan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8 (1), 74 - 82.
- Riswanda, M., Fadhil, Z., Juni, S., & Astuti, W. (2024). Efektivitas Program Kartu Pra-Kerja di Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 2024.
- Sari, M. P., & Yuliani, S. (2024). Implementasi Konsep Arsitektur Berkelanjutan pada Ruang Publik di Kabupaten Purworejo. *ARSITEKTURA*, 22(1), 65. <https://doi.org/10.20961/arst.v22i1.81681>
- SDGs Center UB. (2025). *Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*. Sustainable Development Goals Center Universitas Brawijaya. <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-11-kota-dan-komunitas-yang-berkelanjutan/>
- Sinaga, A. S., Sinurat, A., & Saragih, H. (2025). Zonasi Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Perkotaan yang Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4, 2257.
- Sufianti, E., Jubaedah, E., Abdullah, S. (2020). Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, pp. 19 – 24. 10.2991/assehr.k.210629.005
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). In *Global & Policy* (Vol. 8, Issue 2). Edisi Khusus IROFONIC. <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>